

INDEPENDENSI WARTAWAN MEDIA *ONLINE*: Studi Deskriptif Pada Wartawan Rubrik Politik Berita Kampanye Pilpres Edisi 1-14 Nopember 2018 di Rakyat Merdeka *Online* Jabar

Rina Rahadian Susana^{*1}, Naufal Tijani²

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam KH. Badruzzaman Garut, Indonesia
Email : rahadiansusana23@gmail.com

² Sekolah Tinggi Agama Islam KH. Badruzzaman Garut, Indonesia
Email : naufaltijani@gmail.com

**Korespondensi.*

Submit : **31/01/2024** | Review : **11/03/2024** s.d **11/04/2024** | Publish : **09/08/2024**

Abstract

Independensi merupakan kekuatan media atau wartawan untuk berdiri sendiri tanpa adanya intervensi dari pihak lain yang membuat berita menjadi tidak berimbang. Seperti halnya dalam memberitakan berita politik. Peristiwa politik termasuk memiliki nilai berita yang tinggi, sehingga peristiwa politik hampir selalu menjadi perhatian media massa dan masyarakat. Para wartawan yang mencari, mengumpulkan bahan liputan dan menuliskannya dalam bentuk berita politik seringkali kesulitan untuk menjaga objektivitas pemberitaannya, hal ini dikarenakan adanya campur tangan baik itu dari dalam maupun dari luar redaksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Independensi Wartawan Rubrik Politik Rakyat merdeka Online Jabar.

Kata Kunci : Independensi, Wartawan Politik.

PENDAHULUAN

Sudah menjadi rahasia umum jika media-media arus utama sebagai kepanjangan tangan dari segelintir oknum yang sengaja

menggunakannya sebagai kepentingan bisnis maupun alat politik. Di dalam ruang redaksi pun masih banyak atasan yang membatasi. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam lembaga pers sendiri masih ditemukan tekanan yang mengancam independensi wartawan.

Independensi yang dimaksud adalah kekuatan media atau wartawan untuk berdiri sendiri tanpa adanya intervensi dari pihak lain yang membuat berita menjadi tidak berimbang.

Peristiwa-peristiwa politik termasuk memiliki nilai berita yang tinggi, sehingga peristiwa politik hampir selalu menjadi perhatian media massa dan masyarakat umum. Menurut Hamad dalam bukunya *“Kontruksi Realitas Politik Dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik”* mengatakan:

Hal ini karena ada dua faktor yang saling berkaitan. Pertama, politik dewasa ini berada pada era mediasi, yaitu interaksi politik antara elit politik dengan khalayak membutuhkan media massa sebagai mediator yang mempertemukan artikulasi masing-masing pihak. Kedua, peristiwa politik dalam bentuk tingkah laku dan pernyataan para aktor politik lazimnya selalu mempunyai nilai berita sekalipun peristiwa tersebut merupakan peristiwa politik itu bersifat rutin belaka (Hamad, 2004:1).

Para wartawan yang mencari, mengumpulkan bahan liputan dan menuliskannya dalam bentuk berita politik seringkali kesulitan untuk menjaga objektivitas pemberitaannya. Hal ini disebabkan oleh proses redaksi yang melibatkan ranah kegiatan dalam dapur redaksi (*newsroom*), maupun pengaruh-pengaruh dari luar ruang dapur redaksi yang menarik ulur antara idealisme dan pragmatisme, antara profesional dengan pesanan. Karena itu, kita seringkali disuguhi oleh pemberitaan yang beraneka warna dari suatu peristiwa, dimana sebuah media menonjolkan satu sisi, sementara media yang lain meminimalisir, bahkan menutupi. Dalam pemberitaan apa saja, termasuk politik.

Ada lima faktor yang bisa mempengaruhi produksi berita, seperti yang diungkapkan Shoemaker dan Reese yang dikutip oleh Sudibyo dalam buku *“Politik Media dan Pertarungan Wacana”*:

5 faktor yaitu (1) faktor individual seperti latar belakang pendidikan, agama, gender, inters politik dan sebagainya; (2) rutinitas media yang mencakup mekanisme dan prosedur standar penulisan berita oleh media; (3) level organisasi yakni komponen institusi media yang memiliki peran dan kepentingan dalam produksi berita; (4) level ekstramedia yakni faktor luar media seperti narasumber, negara, iklan, pasar, dan sebagainya; dan (5) level ideology berupa cara pandang dan kerangka berfikir serta sikap dalam menghadapi fenomena (Sudibyo, 2001:7).

Untuk kursi kekuasaan, pemilik media akan cenderung mengontrol ruang redaksi, akibatnya media tersebut menjadi pendukung partai politik atau sikap politik pemiliknya. Pemilik media mengontrol pemimpin redaksi, pemimpin redaksi mengontrol redaktur pelaksana, redaktur pelaksana mengontrol para redaktur, redaktur mengontrol wartawan. Dan pada akhirnya, wartawan di lapangan yang akan teraniaya secara idealismenya.

Atas kondisi tersebut, bukan hanya wartawan yang dirugikan begitupula dengan masyarakat. Pada dasarnya, masyarakat butuh pemberitaan yang layak konsumsi, bukan sebaliknya. Dengan demikian masyarakat tidak bisa lepas dari peran penyebaran informasi. Sementara penyebaran informasi ini tidak lepas dari peran pers, jurnalis dan media massa. Namun faktanya, Pers Indonesia saat ini menunjukkan adanya gejala yang paradoks antara citra idealnya dengan fakta di lapangan.

Pada saat itulah tantangan bagi wartawan untuk memegang prinsip dan etika pemberitaan sehingga mampu menjalankan fungsi pokoknya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan informasi dan bahan pertimbangan yang tepat dalam mengambil keputusan politiknya. Bill Kovach mengingatkan bahwa tujuan paling penting bagi jurnalisme adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan warga agar mereka bisa hidup merdeka dan mengatur diri sendiri (Kovach, et al., 2006:97).

Selain itu juga wartawan pun dituntut untuk tetap menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik pasal 1 tentang Independensi Wartawan. Untuk itu independensi media sangatlah penting. Independen dari otoritas politik, otoritas sosial atau bisnis, dan tidak ada bias personal. Loyalitas

jurnalisme semestinya bukan loyalitas pada pemilik media tetapi loyalitas kepada warga negara.

Ketika jurnalisme telah diintervensi kepentingan komersial pemilik media, maka kita tidak akan pernah menemukan suatu proses pemberitaan yang benar-benar bersifat netral. Ideologi dibalik jurnalisme profesional tidak lain sebagai bentuk penghambaan terhadap pemilik modal dan pemasang iklan dalam suatu sistem media. Isi bukan ditujukan bagi kepentingan pembaca atau pemirsa, tetapi justru lebih diupayakan bagi kepuasan pemodal dan pemasang iklan yang notabene elit politik.

Ada banyak contoh kasus bagaimana media dan wartawan dijadikan sebagai alat propaganda untuk mendukung individu, kelompok, atau pemerintahan. Pers pada banyak kasus digunakan untuk menyerang dan menjatuhkan pihak lawan. Demikian juga ada banyak penguasa yang menggunakan media untuk melanggengkan kekuasaannya.

Peneliti mengkaitkan beberapa dugaan permasalahan yang nantinya akan dilakukan penelitian terhadap wartawan Media *Online* Rakyat Merdeka *Online* Jabar khususnya di Rubrik Politik. Rubrik Politik ini merupakan salah satu konten di Media *Online* RMOL Jabar yang berpengaruh, pasalnya rubrik ini merupakan rubrik fokus utama pemberitaan di RMOL Jabar.

Pada rubrik politik ini, rawan sekali pemberitaannya mendapatkan intervensi dari pihak luar, apalagi ketika media dikuasai oleh pemilik media yang sekaligus merupakan politikus. Bagaimana wartawan rubrik politik memahami berita politik, menyajikan berita politik, menyikapi intervensi dan tekanan dalam pemberitaannya, dan menjalankan profesinya sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.

Dari permasalahan yang telah diuraikan, wartawan dituntut untuk selalu bersikap independen demi menjaga nama baik profesinya. Kunci independensi bagi jurnalis adalah kesetiaan pada kebenaran. Independensi ini juga yang harus dijungjung tinggi diatas identitas lain seorang wartawan. Permasalahan ini akhirnya menjadi latar belakang tujuan dilakukannya penelitian ini.

Adapun Kode Etik Jurnalistik yang menjadi fokus penelitian adalah Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 mengenai Independensi wartawan dalam praktik jurnalistiknya. Wartawan di Media *Online* RMOL Jabar khususnya di Rubrik Politik dipilih sebagai subjek penelitian karena dianggap sebagai individu aktif yang mempunyai berbagai pengalaman dan kenyataan saat melakukan peliputan berita. Data akan digali dari subjek penelitian Deskriptif Pendekatan Kualitatif. Eksplorasi difokuskan pada pengalaman wartawan dalam menjalankan profesinya ketika dihadapkan untuk independen.

Maka berdasarkan uraian di atas peneliti mengambil judul *Independensi Wartawan Media Online (Studi Deskriptif Pada Wartawan Rubrik Politik Berita Kampanye Pilpres Edisi 1-14 Nopember 2018 di Rakyat Merdeka Online Jabar)*.

Penelitian terdahulu ini sangat penting untuk peneliti dalam mengkaji penelitian yang hendak dilakukan. Selain dapat memperkaya wawasan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian nantinya, penelitian terdahulu ini juga menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian. Di bawah ini merupakan penelitian terdahulu, sebagai bahan referensi dalam memperkaya bahankajian pada penelitian penulis.

Pertama, Ilham Prisgunanto melakukan penelitian tahun 2017, dengan judul *Kode Etik Jurnalistik Di Kalangan Wartawan Media Massa Cetak Islam*. Dari hasil analisis pada masing-masing variabel, diketahui bahwa tingkat pemahaman wartawan yang bekerja di media massa bergenre Islam akan etika jurnalistik sudah tinggi. Bagi wartawan ada rasa keharusan untuk menerapkan etika jurnalistik di tempat kerja dan itu diakui sudah tidak bisa ditawar lagi. Dalam kerja di lapangan bagi wartawan yang bekerja di media cetak bergenre Islam unsur dedikasi adalah hal terpenting dalam bekerja di lapangan.

Kedua, Ristin Ristiani penelitian tahun 2018, judul *Profesionalisme Wartawan Dalam Peliputan Berita Radio Di RRI Pekanbaru*. Hasil penelitian adalah Profesionalisme wartawan yang diuraikan dalam penelitian ini merangkum tiga lingkupan yang telah ditetapkan oleh

peneliti melalui konsep profesional. Adapun tiga lingkup profesional yang diuraikan, pertama mulai dari proses peliputan berita, Kedua, profesionalisme dari latar belakang pendidikan, wartawan RRI rata-rata bukan dari latar belakang pendidikan jurnalistik, namun telah mengikuti pelatihan berkala sebagai wartawan. Ketiga, profesionalisme dilihat dari unsur berita yang akan dimuat, unsur berita yang dimuat oleh RRI sesuai dengan fakta yang ada dan mengandung pertanyaan berita 5W+1H.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Alasan penulis memilih metode deskriptif dikarenakan metode ini adalah cara yang sesuai bagi peneliti untuk memaparkan temuan-temuan dalam penelitian yang akan diteliti. Metode deskriptif biasa juga disebut dengan penelitian taksonomi (*taxsonomic research*). Metode deskriptif dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.

LANDASAN TEORITIS

Independensi diartikan sebagai sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain (Mulyadi, 2002: 26). Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri, mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan objektif tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Independen dapat berarti bebas, merdeka, atau berdiri sendiri. Independen pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi yang kegiatannya tidak terpengaruh atau terintervensi oleh pihak manapun yang tetap memegang amanat konstitusi dan semangat pancasila. Dengan kata lain, pers yang independen adalah pers yang bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang benar dan obyektif, penyalur aspirasi rakyat dan kontrol sosial yang konstruktif.

Independen pers sangat diperlukan sebagai dasar sikap kemerdekaan berita dan penyampaian secara objektif. Begitupun pada

media pers di Indonesia, sikap independen haruslah tidak ditunjukkan pada salah satu pihak saja. Artinya bukan hanya pada wartawan sebagai penulis, tetapi lebih besarnya terjadi pada politik pemberitaan atau politik keredaksian masing-masing pemilik atau pengusaha pers untuk tetap berada pada alur yang objektif. Walaupun realitanya agak berbeda ketika media dikuasai oleh pengusaha sekaligus politikus.

Pengertian Komunikasi Politik Menurut Nimmo, Politik berasal dari kata polis yang berarti negara, kota, yaitu secara totalitas merupakan kesatuan antara negara (kota) dan masyarakatnya. Kata polis ini berkembang menjadi politicos yang artinya kewarganegaraan. Dari kata politicos menjadi politera yang berarti hak hak kewarganegaraan.

Menurut Gabriel Almond (1960) : "komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. *"All of the functions performed in the political system, political socialisation and recruitment, interest articulation, interest aggregation, rule making, rule application, and rule adjudication, are performed by means of communication."* Definisi Komunikasi Politik Secara definitif, ada beberapa pendapat sarjana politik, diantaranya Nimmo, mengartikan politik sebagai kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial. Dalam berbagai hal orang berbeda satu sama lain jasmani, bakat, emosi, kebutuhan, cita-cita, inisiatif, perilaku, dan sebagainya.

Lebih lanjut Nimmo menjelaskan, kadang-kadang perbedaan ini merangsang argumen, perselisihan, dan percekungan. Jika mereka menganggap perselisihan itu serius, perhatian mereka dengan memperkenalkan masalah yang bertentangan itu, dan selesaikan; inilah kegiatan politik.

Bagi Lasswell, politik ialah siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana caranya (who gets what, when, how). Selain itu, politik juga dipahami sebagai pembagian nilai-nilai oleh orang-orang yang berwenang, kekuasaan, dan pemegang kekuasaan. Mengenai komunikasi

politik ini (political communication) Kantaprawira, memfokuskan pada kegunaanya, yaitu untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intra golongan, institusi, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor kehidupan politik pemerintah. Dengan demikian segala pola pemikiran, ide atau upaya untuk mencapai pengaruh, hanya dengan komunikasi dapat tercapainya segala sesuatu yang diharapkan, karena pada hakikatnya segala pikiran atau ide dan kebijakan (*policy*) harus ada yang menyampaikan dan ada yang menerimanya, proses tersebut adalah proses komunikasi.

Dilihat dari tujuan politik, maka hakikat komunikasi politik adalah upaya kelompok manusia yang mempunyai orientasi pemikiran politik atau ideology tertentu dalam rangka menguasai dan atau memperoleh kekuasaan, dengan kekuatan mana tujuan pemikiran politik dan ideology tersebut dapat diwujudkan.

Lasswell, memandang orientasi komunikasi politik telah menjadikan dua hal sangat jelas: pertama, bahwa komunikasi politik selalu berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan; nilai-nilai dan tujuan itu sendiri dibentuk di dalam dan oleh proses perilaku yang sesungguhnya merupakan suatu bagian; dan kedua, bahwa komunikasi politik bertujuan menjangkau masa depan dan bersifat mengantisipasi serta berhubungan dengan masa lampau dan senantiasa memperhatikan kejadian masa lalu. Seperti yang pernah dikemukakan oleh banyak ahli, terutama Harold D Laswell dengan formula "Who says what, in which channel, to whom, with what effect", komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari sumber komunikasi kepada penerima, yang berlangsung bisa menggunakan saluran (medium) maupun secara bertatap muka. Umpan balik sebagai balikan atas pesan yang telah diterima oleh penerima dalam proses komunikasi tersebut sangat berguna untuk menilai bagaimana akibat yang terjadi dari proses komunikasi.

Komponen-komponen komunikasi tersebut merupakan basis bagi terjadinya proses komunikasi politik dalam suatu masyarakat. Untuk memperjelas pemahaman berikutnya tentang komunikasi politik, Alwi Dahlan mengemukakan bahwa, sebagai bidang kajian ilmu, komunikasi politik merupakan bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik, atau berpengaruh terhadap perilaku politik.

Berbasis pada formulasi komunikasi demikian saja menurut Fagen nampaknya terlalu sederhana, karena alur yang komunikasi politik berjalan satu arah (linier) dari sumber komunikasi sebagai pemrakarsa kepada orang lain sebagai penerimanya. Namun demikian agar memenuhi tujuan, rumusan tersebut perlu dimodifikasi. Tanpa ada teori politik umum yang didasarkan pada komunikasi, akan muncul kesulitan bagi “suatu pendekatan untuk studi politik”, suatu pendekatan di mana komunikasi sebagai suatu proses menjadi inti pemahaman, sehingga secara hipotetik nampak berkembang. Fagen menambah usulan bahwa untuk kepentingan penelitian terdapat 3 hal yang penting:

- a) Komunikasi sebagai proses mengisi politik sebagai suatu kegiatan.
- b) Apabila hal-hal itu tidak jelas benar, maka dapat digambarkan beberapa aspek kehidupan politik sesuai tipe-tipe komunikasi.
- c) Karena proses komunikasi memiliki kemampuan mengisi dan elastis dari perbendaharaan konsep ilmu politik, maka ada suatu literatur yang mungkin relevan bagi studi politik dan komunikasi.

Sebagai tambahan Kaid mengemukakan tak satupun konsep tentang komunikasi politik bisa diterima secara luas, tetapi kecuali apa yang disampaikan Chaffe yang secara sederhana menyampaikan bahwa komunikasi politik adalah “peranan komunikasi dalam proses politik”. Berkaitan dengan peran komunikasi dalam proses politik itu menjelaskan dengan gamblang menggunakan contoh: setelah menerima informasi dari berbagai pihak, mereka yang bertugas melaksanakan fungsi legislatif membuat UU yang dianggap perlu dan

relevan, yang kemudian dikomunikasikan kepada yang berwenang (eksekutif dengan aparatnya) untuk melaksanakannya.

Proses pelaksanaannya dikomunikasikan kepada masyarakat dan dinilai oleh masyarakat, penilaian itu kemudian dikomunikasikan lagi. Dalam seluruh proses komunikasi politik ini media massa, baik cetak maupun elektronika, memainkan peranan penting, di samping bentuk-bentuk komunikasi lain seperti bertatap muka, suratmenyurat, media tradisional, keluarga, organisasi, pergaulan.

Berkaitan dengan peran komunikasi politik dalam memelihara dan meningkatkan kualitas kehandalan suatu sistem politik yang sudah mapan, maka ia berperan memelihara dan mengembangkan budaya politik yang sudah menjadi landasan sistem itu. Oleh karena itu “komunikasi politik berperan mentransmisikan nilai-nilai budaya politik yang bersumber dari pandangan hidup atau ideologi bersama masyarakatnya kepada generasi penerusnya dan mempekuat proses pembudayannya dalam diri generasi yang lebih tua. Jadi, budaya politik itu terpelihara dengan baik, bahkan mungkin berakar dan terus berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Komunikasi politik yang ada menjadi bagian integral dari budaya politik tersebut”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini akan menunjukkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menghasilkan beberapa fakta yang mampu menggambarkan Independensi wartawan media *online* Rakyat Merdeka *Online* Jabar. Hasil penelitian ini didapatkan dari para informan saat wawancara mendalam yang dilakukan peneliti. Keterangan yang dimaksud di sini adalah berupa independensi wartawan media *online* Rakyat Merdeka *Online* Jabar ketika melakukan peliputan berita politik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menemukan fakta tentang pemahaman berita politik, penyajian berita politik, dan independensi wartawan Rakyat Merdeka *Online* Jabar.

Pemahaman Wartawan Terhadap Berita Politik

Bagian pemahaman Wartawan Rubrik Politik Rakyat Merdeka *Online* Jabar terhadap berita politik ini akan menguraikan keterangan informan tentang pemahamannya terhadap berita politik yang dilibatkan saat menjalankan tugasnya sebagai wartawan rubrik politik media *online*, dari keterangan tersebut secara umum informan memahami berita politik yang melekat dalam profesinya tersebut.

Faktor yang menjadikan informan tahu mengenai berita politik diantaranya adalah jam terbang di lapangan, dunia kerja dan lingkungan. Wartawan yang memiliki jam terbang lebih lama di lapangan dalam peliputan berita politik lebih memahami apa itu berita politik dibandingkan dengan wartawan yang jam terbangnya terbilang baru dalam peliputan berita politik.

Hasil wawancara menunjukan bahwa pemahaman terbagi menjadi dua, definisi berita politik, dan kebijakan dalam peliputan berita politik. Hasil pemahaman dari penelitian ini wartawan rubrik politik harus paham mengenai berita politik yang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Selain itu saat melakukan peliputan wartawan rubrik politik harus memegang kebijakan peliputan berita politik. Sehingga berita yang akan didapat akan menghasilkan berita yang menarik dan dipahami oleh pembaca. Karena seorang wartawan rubrik politik dituntut harus membuat berita politik yang bisa berimbang dan tidak mengusung kepentingan organisasi atau partai tertentu. Sebab wartawan rubrik politik merupakan wakil perangkat komunikator politik, dimana wartawan sebagai saluran komunikasi, yang menghasilkan transaksi sumber saluran, dan menciptakan hubungan pemerintahan dan pers.

Pemahaman keenam wartawan sebagai wartawan rubrik politik tentang definisi berita politik hampir seluruhnya menyatakan bahwa berita politik adalah berita tentang segala hal yang berhubungan dengan pemerintahan dan aktivitas politik. Berita politik mempunyai pengertian

penting dalam seorang wartawan, apalagi dalam pers dimana berita politik merupakan komunikasi politik antara pemerintahan atau aktivitas politik dengan masyarakat, dimana berita politik sendiri akan mempengaruhi masyarakat dalam menentukan sikap politiknya.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan beberapa informan mengatakan dari definisi berita politik yang dipahaminya bahwa perannya sebagai seorang wartawan rubrik politik sangat berpengaruh dalam menghasilkan dampak yang berpengaruh kepada publik, sebab itu prinsip wartawan rubrik politik untuk memberikan berita yang akurat dan berimbang diharuskan untuk mencari narasumber atau sumber berita yang kompeten dan bertanggungjawab.

Bisa disimpulkan bahwa berita politik adalah segala peristiwa politik yang berasal dari pemerintahan, masyarakat, atau bahkan aktor politik. Dimana wartawan sebagai komunikator yang menjadi perantara untuk memberitakan informasi dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya.

Menyajikan Berita Politik

Semua peristiwa dan permasalahan dapat menjadi berita setelah berita tersebut diangkat, diolah dan disajikan sebagai berita dalam media. Dalam mengungkapkan fakta-fakta media terikat oleh kewajiban untuk memaparkan berita secara lengkap.

Setiap pembahasan mengenai bagaimana pers menyajikan berita politik harus dimulai dari kesadaran bahwa berita yang relevan dengan politik meliputi bagian yang relatif kecil dari makanan media sehari-hari. Namun, tanpa ada hubungannya dengan jumlah berita politik yang disajikan, puncak proses yang bertalian dengan pejabat dan jurnalis melalui proses pengumpulan berita adalah kisah penyajian berita politik (Nimmo, 2000: 236).

Penyajian kepada pembaca, merupakan hasil dari urutan pilihan kebijakan yang dicapai di dalam organisasi berita mengenai ihwal mana yang harus disajikan, berapa banyak ruang dan atau waktu yang disediakan bagi masing-masing, di mana menempatkan masing-masing

(halaman pada surat kabar, periode waktu untuk radio dan televisi), reporter mana yang namanya akan dicantumkan pada cerita, dan hal-hal penting lainnya. Kita telah meninjau konvensi-konvensi yang mempengaruhi pemilihan untuk media cetak seperti surat kabar dan majalah berita ini diantaranya piramida terbalik yang menempatkan fakta yang paling dramatis terlebih dulu, pencarian gantungan berita (*news peg*) yang dikenal untuk menanamkan berita dalam pemahaman pembaca, dan fokus pada siapa, apa, kapan, di mana, bagaimana, dan (dalam hal pelaporan interpretatif) mengapa, (Nimmo, 2000: 237).

Media akan memilih berita mana saja yang akan dimuat, salah satu pertimbangan dalam proses memilih suatu berita dimuat adalah nilai berita. Selain memperhatikan nilai berita, media juga akan memperhatikan unsur-unsur layak berita diantaranya berita harus akurat, berita harus lengkap, dan berita harus berimbang.

Imron Hidayat mengatakan, ketika seorang wartawan menyajikan berita politik, sebagai langkah pertama yaitu data yang didapat haruslah akurat dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, dalam pemilihan narasumber atau sumber berita juga harus yang kompeten dan dapat dipertanggungjawabkan. Juga menghindari intervensi-intervensi yang ada saat peliputan. Imron juga menjelaskan cara-cara agar terhindar dari intervensi dari luar yaitu dengan memberikan pemahaman terhadap berita yang akan dibuatnya.

Dalam penyajian sebuah berita politik wartawan dituntut menjunjung tinggi profesionalisme wartawan. Praktek penyajian sebuah berita tidak akan pernah lepas dari unsur-unsur yang melatarbelakangi pembuatan berita tersebut.

Berita tentang suatu peristiwa pada dasarnya adalah suatu rekontruksi tertulis. Wartawan melaporkan kembali apa yang dilihat, dirasakan, dan diamati kepada pembaca. Idealnya, seorang wartawan harus dapat menceritakan ulang sebuah peristiwa secermat mungkin, sehingga pembaca seolah-olah melihat langsung di tempat kejadian.

Dalam penelitian ini, yang peneliti dapatkan bahwa informan mengaku tidak pernah mendapatkan tekanan yang dapat mengganggu independensi dan keberimbangan dalam tugasnya memberitakan suatu peristiwa. Media tempatnya bekerja memegang teguh apa yang terdapat dalam kode etik jurnalistik dan menjaga profesionalisme wartawannya. Hal ini selaras dengan Bill Kovach dan Rosantinel (2006:78) yang menyatakan bahwa wartawan harus memegang kata akhir untuk urusan berita, artinya siapa pun dapat mengintervensi wartawan, karena yang mengetahui kebenarannya adalah wartawan itu sendiri.

Meski banyak intervensi dalam peliputan dan pemberitaan berita politik khususnya, tidak berarti wartawan harus berdiam diri dan tidak melakukan kontrol pemerintah. Berbagai upaya dilakukan untuk menyiasati keadaan tersebut. Seperti Imron Hidayat, menanggapi intervensi dengan terus memberikan pemahaman terhadap berita yang akan ia beritakan, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan tetap untuk menjaga nilai berita dan tidak menodainya. Intervensi dari dalam media sendiri, dirinya menyebutkan bahwa di Rakyat Merdeka *Online* Jabar sendiri tidak ada intervensi pada pemberitaan, tetapi bedahalnya dengan bisnis. Tapi dalam pemberitaannya juga masih sesuai pada kaidah jurnalistik.

Menyikapi intervensi dari luar para informan sepakat menyatakan bahwa tetap dalam prinsipnya yaitu menjaga profesionalisme seorang wartawan dalam menjalankan tugasnya. Dengan cara menjalin hubungan baik dengan narasumber. Maka dari itu dalam pemberitaannya para informan mengatakan harus bersikap jujur, dan menyajikan berita sesuai fakta dilapangan.

Independensi Wartawan Rakyat Merdeka *Online* Jabar

Independensi merupakan suatu sikap yang tidak berpihak dan tidak ada campur tangan orang lain ini menunjang terhadap keberimbangan pada berita yang dihasilkan dimana keberimbangan sendiri merupakan suatu sikap yang tidak memihak manapun dan selalu melaksanakan cover

both side. Hasil penelitian dari segi aspek Independensi Wartawan Rakyat Merdeka *Online* Jabar menghasilkan dua hal, yaitu Pemahaman Independensi Wartawan dan Implementasi Independensi Wartawan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan definisi independensi menurut enam (6) informan adalah, tidak berpihak, tidak ada intervensi, tidak ada tekanan dan sesuai fakta. Pernyataan tersebut sesuai dengan penafsiran kode etik jurnalistik pasal 1 yaitu independensi berarti memberitakan fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pihak perusahaan.

Wartawan memainkan peranan penting sebagai pilar ke-4 dalam demokrasi. Untuk itu wartawan harus bersikap independen dan terlepas dari intervensi pihak luar. Independensi ini tidak hanya berlaku pada hubungan wartawan dengan pemerintah saja, namun juga berlaku pada hubungan wartawan dengan sumber beritanya.

Dengan demikian, Kovach (dalam Harsono, 2010:24) mengatakan seorang wartawan tidak mencari teman, tidak juga mencari musuh. Independensi wartawan tidak dapat ditekan oleh campur tangan dari pihak manapun, termasuk dari pemilik perusahaan pers itu sendiri.

Kode Etik Jurnalistik menegaskan dalam pasal 1 : “Wartawan Indonesia bersikap independen yang berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan dan intervensi pihak lain.

Wartawan tidak hanya bersikap netral dan tidak memihak saja dalam melaksanakan kegiatan jurnalistiknya, karena itu hanya sebagian kecil dari pengertian independensi bukan dari inti jurnalisme.

Sebagai kata sifat, independensi berarti punya kewenangan sendiri, mandiri, percaya diri, dan tidak butuh uang atau apapun untuk hidup. Sedangkan sebagai kata benda, independensi merupakan sebuah makna dalam urusan politik tidak memihak atau bisa dikatakan bahwa independensi merupakan sikap tidak partisan.

Wartawan merupakan ujung tombak kegiatan jurnalistik. Kualitas sebuah berita sebagian besar bergantung pada kualitas wartawan sehingga profesionalisme wartawan sangat penting dalam menjalankan tugasnya. Pengetahuan, keterampilan dan kesiapan mental seorang wartawan adalah modal besar untuk mencapai profesionalisme.

Jika wartawan atau media memiliki hubungan yang bisa dipersepsikan sebagai konflik kepentingan, mereka berkewajiban melakukan *“full-disclosure”* tentang hubungan itu tujuannya adalah agar pembaca waspada dan menyadari bahwa tulisan atau liputan itu tidak terlalu independen. Jurnalisme independen adalah kegiatan jurnanisme yang dalam proses peliputan dan beritanya tidak melakukan keberpihakan kepada kelompok atau golongan tertentu. Maka *“Independen”* bukan berarti *“netral”* seperti yang sering disalah pahami oleh publik. Netralitas hanyalah salah satu sikap atau pendirian wartawan dalam kebijaksanaan redaksional ketika hendak menyiarkan pemberitaan. Tetapi independensi wartawan mengandung makna lebih luas dari netralitas, yaitu sikap atau pendirian apapun termasuk netral atau imprasial sesuai dengan pertimbangan profesional wartawan dengan mengingat tujuan pemberitaan demi kepentingan umum.

Seluruh informan sepakat menempatkan independensi sebagai prinsip atau elemen keempat jurnalisme. Independensi bagi wartawan berada pada semangat dan pikirannya. Wartawan seharusnya tidak netral melainkan bersikap dalam karyanya. Independensi diukur dari kredibilitas, kredibilitas wartawan berakar pada akurasi, verifikasi dan kepentingan publik yang lebih besar dan hasrat untuk menyampaikan informasi.

Hal ini diperkuat oleh Bill Kovach dan Rosentiel (2006:97) yang menyatakan dalam buku 9 elemen jurnalisme bahwa independensi merupakan sesuatu yang penting. Wartawan sebisa mungkin bersikap independen, tanpa takut dan tanpa tekanan, tanpa konflik kepentingan. Namun dalam banyak kasus, wartawan tidak bisa independen total karena bekerja untuk majikan yang punya kekuasaan dan uang.

Pada dasarnya semua wartawan Rakyat Merdeka *Online* Jabar rubrik politik memahami independensi wartawan. Pemahaman mereka terhadap independensi wartawan ini ditandai dengan, dalam pemberitaannya mereka paham bahwa berita harus berimbang dan tidak berat sebelah. Tidak mengusung kepentingan pihak manapun atau organisasi manapun. Mereka juga memahami Kode Etik Jurnalistik pasal 1 yang berbunyi “Wartawan Indonesia bersikap Independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”. Wartawan Rakyat Merdeka *Online* Jabar mengatakan bahwa mereka tidak ingin mencederai Independensi wartawan atau melanggar Kode Etik Jurnalistik. Karena mereka harus bertanggungjawab terhadap masyarakat dengan memberikan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk.

Penerapan independensi wartawan saat peliputan akan berdampak pada berita yang dihasilkan. Bagaimana wartawan Rakyat Merdeka *Online* Jabar dalam menerapkan Independensi Wartawan saat melakukan peliputan berita.

Hasil penelitian menunjukan wartawan Rakyat Merdeka *Online* Jabar dalam menerapkan Independensi Wartawan saat melakukan peliputan berita, diantaranya adalah dengan memberitakan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Hal ini sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 yang berbunyi “Wartawan Indonesia bersikap Independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk”.

Semua informan menyatakan bahwa sikap independen, dalam tugasnya seorang jurnalis harus melayani kepentingan semua orang. Sama dengan Nurudin (2009:101) menyatakan Jurnalisme melayani kepentingan umum, namun bukan melayani kepentingan sekelompok tertentu atau bahkan melayani kekuasaan politik. Serupa dengan yang dinyatakan Bill Kovach dan Rosentiel bahwa perusahaan harus menomorsatukan warga (Bill Kovach dan Rosentiel, 2006:74). Maksudnya, apapun yang terjadi pemberitaan faktual harus dimuat atau disiarkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penelitian independensi wartawan media *online* rubrik politik Rakyat Merdeka *Online* Jabar bahwa independensi wartawan rubrik politik RMOL Jabar berdasarkan hasil dilapangan, menyatakan bahwa seluruh wartawan rubrik politik RMOL Jabar independen dan sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik pasal 1. Dimana dalam pemberitaannya berimbang, tidak memihak, dan tidak beritikad buruk.

REFERENSI

- Afdjani, Hadiono. 2014. Ilmu Komunikasi, Proses dan Strategi. Tangerang: Indigo Media.
- Alwasilah, A. Chaedar. 2015. *Pokoknya Studi Kasus Kualitatif*. Bandung: PT. Kiblat Buku Utama.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian kualitatif*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Grup.
- Hidayat, Dadang Rahmat, dkk. 2015. "Fenomena Penyimpangan Profesi Jurnalis". Jurnal komunikasi, Volume 10, Nomor 1, Oktober 2015.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Erlangga.
- Ishwara, Luwi. 2011. *Jurnalisme Dasar*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Kovach, Bill & Tom Rosentiel. 2006. *Sembilan Elemen Jurnalisme*. Jakarta: Yayasan Pantau.
- Margono. 2004. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- McQuail, Denis. 2011. *Teori Komunikasi*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Monica, Riski. 2017. "Fenomena Wartawan Amplop di Kota Palu (Studi Kasus Pada Wartawan AJI)". Jurnal Online Kinesik Vol. 4 No. 2 2017.
- Mulyana, Deddy. 2008. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Nimmo, Dan. 2000. *Komunikasi Politik (Komunikator, Pesan, Media)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurudin. 2009. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Oetama, Jakob. 2001. *Pers Indonesia: Berkomunikasi Dalam masyarakat Tidak Tulus*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Panuju. Redi. 2005. *Nalar Jurnalistik : Dasarnya Dasar Jurnalistik*. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Prisgunanto, Ilham. 2017. "*Kode Etik Jurnalistik Di Kalangan Wartawan Media Massa Cetak Islam*". Jurnal Komunikasi Global, Volume 6, Nomor 2, 2017.
- P. Swantoro. 2001. *Masalalu Selalu Aktual*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Romli, Asep Syamsul M. 2005. *Jurnalistik Online : Jurnalistik Praktis Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Santana, K. Septiawan. 2005. *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. 2007. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta. Bumi Aksara.
- Sumadiria, AS. Haris. 2014. *Jurnalistik Indonesia : Menulis Berita dan Feature*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Suryawati, Indah. 2011. *Jurnalistik Suatu Pengantar: Teori & Praktik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Yunus, Syarifudin. 2010. *Jurnalistik terapan*. Bogor: Ghalia Indonesia.